



**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Salotungo No. ... Telp. (0484) 21619 Watansoppeng Kode Pos 90812

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 718/KDS/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. bahwa keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang mendesak dan menutupi defisit anggaran tahun berjalan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c serta sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah, perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 dengan keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan) Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018**

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode tahun berjalan yaitu Tahun 2018.

Pasal 2

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. A. TENRI SESSU, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19640528 199103 1 009

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan yang dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat bahwa Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain hal tersebut, Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai. Dalam lingkup nasional Rencana Kerja Sekretariat Daerah berpedoman juga pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang terkait

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara

dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Soppeng ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Soppeng.

Adapun Proses penyusunannya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Soppeng.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025.
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
 35. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;



36. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng;
37. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan) Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja SKPD) tahun 2018 ini disusun untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng yang dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menjamin agar terciptanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program tahunan serta menjadi pedoman dan acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah..

B. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Perubahan Renja SKPD) tahun 2018 bertujuan sebagai alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Disamping itu juga ditujukan sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan Renstra tahun 2016-2021

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat



rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Perangkat Daerah yang telah dibuat, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan ataupun program yang telah disusun akan terlihat pada evaluasi hasil pelaksanaannya yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaiannya dapat dilihat pada Evaluasi Renja untuk triwulan kedua tahun 2018 pada halaman selanjutnya.





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No.	Kode	Usran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s.d. Tahun 2018		Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
I.	4.04.4.04.03.01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN																
1.	4.04.4.04.03.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kesehatan Lainnya	Mengikuti rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Daerah serta Kesehatan Lainnya	Bulan				12	149.232.000	125.782.100	3	2.575.400	17.614.631	6	20.190.031	0,00	0,00	Bag. Adm. Pembangunan
2.	4.04.4.04.03.01.11	Pembinaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan				12	176.561.000	123.069.668	3	24.647.568	32.655.550	6	57.303.118	0,00	0,00	Bag. Adm. Pembangunan
II.	4.04.4.04.03.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KELUANGAN																
1.	4.04.4.04.03.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kerja SKPD	Tersedianya RENSTRA dan RENJA Sekretariat Daerah	dok				1	38.779.290	7.050.000						0,00	0,00	Bag. Adm. Pembangunan
II.	4.04.4.04.03.04	PROGRAM FASILITASI DAN PROMOSI KEBERKANTORAN																
1.	4.04.4.04.03.04.05	Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dari dan Data Base antar kecamatan/daerah.	Tersedianya laporan hasil kegiatan	dok				1	41.140.000	1.060.000						0,00	0,00	Bag. Adm. Pembangunan
IV.	4.04.4.04.03.06	PROGRAM PENGENDALIAN ADMINISTRASI																
1.	4.04.4.04.03.06.01	Pengendalian dan Pengkalan Data Pembangunan se-Kabupaten Support	Tersedianya laporan dan capaian realisasi fisik proyek/kegiatan pembangunan	dok				1	38.324.209	12.250.000						0,00	0,00	Bag. Adm. Pembangunan
VI.	4.04.4.04.03.06.02	Pembinaan Jasa Konsultasi/Kabupaten	Tersedianya pembinaan jasa konsultasi tingkat Kabupaten	dok				1	123.259.191	33.929.232						0,00	0,00	Bag. Adm. Pembangunan
V.	4.04.4.04.03.07	PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA																
1.	4.04.4.04.03.07.01	Pengelolaan Unit Layanan Barang/ Jasa (ULP)	Jumlah Paket Pengadaan Barang/ Jasa yang di tender	Paket				110	300.883.803	293.270.000						0,00	0,00	Bag. Adm. Pembangunan
2.	4.04.4.04.03.07.02	Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa	Tersedianya data evaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang di tender	dok				1	96.594.421	1.060.000						0,00	0,00	Bag. Adm. Pembangunan
I.	4.04.4.04.03.01	Program Pelayanan Perkantoran																
1.	4.04.4.04.03.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kesehatan Lainnya	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kali					42.500.000	80.000.000	30	10.600.800	32.979.850	30	43.580.650	0,00	0,00	Bagian Ortbla
2.	4.04.4.04.03.01.11	Pembinaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	bulan				12	1.974.943.245	53.024.275	3	5.864.900	7.820.000	6	13.784.900	0,00	0,00	Bagian Ortbla
3.	4.04.4.04.03.01.12	Pembinaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Jasa Perkantoran	Orang				152	129.000.000	127.375.000						0,00	4,99	Bagian Ortbla
II.	4.04.4.04.03.03	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur																
1.	4.04.4.04.03.03.09	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Adanya peningkatan pemahaman dan pengembangan profesionalisme pejabat ASN tingkat Sotda	Orang					139.960.669	39.000.000						0,00	2,08	Bag. Ortbla





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
I.	4.04.4.04.03.01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Presentasi Tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Perkantoran													
1.	4.04.4.04.03.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mengikuti rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Media	315	2.314.683.000	34	363.000.000	20	101.385.000	20	101.385.000	6,35	4,38	Bag. Humas & Protokol	
2.	4.04.4.04.03.01.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Serta Kelembagaan Lainnya	Mengikuti rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Kali	-	-	-	425.500.000	230.125.000	39.667.400	131.836.967	171.594.367	0,00	0,00	Bag. Humas & Protokol	
3.	4.04.4.04.03.01.11	Pembinaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan	Tahun	-	-	12	250.000.000	174.626.150	3	44.086.650	61.236.650	0,00	0,00	Bag. Humas & Protokol	
4.	4.04.4.04.03.01.17	Penyediaan Operasional Mess Pemda Jekatera	Jumlah Peluang Mess Pemda Yang Terbayarkan	Kegiatan	-	-	-	220.825.000	309.000.000	-	76.306.200	122.717.400	0,00	0,00	Bag. Humas & Protokol	
II.	4.04.4.04.03.02	PROGRAM PENGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Presintasi Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik													
1.	4.04.4.04.03.02.01	Perbaikan Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	Perbaikan Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	Paket	48	200.605.960	-	31.440.000	15.000.000	-	13.100.000	13.100.000	0,00	6,53	Bag. Humas & Protokol	





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun yang dievaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (AKHR) Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s.d. Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
III. 4.04.4.04.03.09																		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDUKERAN																		
1	4.04.4.04.03.09.02	Pengembangan kegiatan Reproduksi dan Peningkatan Kualitas	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	kali	345	878.121.864	12	137.711.400	198.350.000	3	16.775.000	25,00	8,46	16.775.000	0,87	1,91	Bag. Humas & Protokol	
I. 4.04.4.04.03.01																		
Program Pelayanan																		
1	4.04.4.04.03.01.10	Repat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah serta kedinasannya	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Bulan	-	-	12	199.836.780	128.669.650	3	37.699.400	25,00	29,31	37.699.400	0,00	0,00	Bag. Adm. Perencanaan & SDA	
2	4.04.4.04.03.01.11	Pengoptimalan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Bulan	-	-	12	93.026.230	83.681.800	3	24.276.660	50,00	41,97	35.117.320	0,00	0,00	Bag. Adm. Perencanaan & SDA	
II. 4.04.4.04.03.04																		
Program Fasilitas dan Koordinasi Kelengkapan Pemda																		
3	4.04.4.04.03.04.02	Sosialisasi Kelurahan di Bidang Cukai	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Kali	6	421.338.550	1	66.550.000	39.071.950	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bag. Adm. Perencanaan & SDA	
4	4.04.4.04.03.04.03	Koordinasi Pemukiman dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau legal	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Bulan	24	1.429.672.240	12	222.640.000	160.924.250	3	4.565.100	16.650.000	50,00	13,18	21.215.100	25,00	1,48	Bag. Adm. Perencanaan & SDA
5	4.04.4.04.03.04.13	Pembiayaan Aqar/Pengakuan BBN dan LPG Bersubsidi	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Bulan	6	25.888.700	12	40.700.000	6.900.000	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bag. Adm. Perencanaan & SDA
6	4.04.4.04.03.04.14	Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Bulan	6	373.987.400	12	55.000.000	10.525.000	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bag. Adm. Perencanaan & SDA
7	4.04.4.04.03.04.15	Koordinasi Teknis Perencanaan Tenak Berkualitas	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Bulan	6	261.144.250	12	38.500.000	9.503.925	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bag. Adm. Perencanaan & SDA
8	4.04.4.04.03.04.17	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan RPH dan Laki Lintas Masyarakat terkait proses pelaksanaan peng	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Bulan	5	152.627.500	12	27.500.000	11.512.500	3	1.031.250	1.031.250	50,00	17,92	2.062.500	120,00	1,35	Bag. Adm. Perencanaan & SDA
9	4.04.4.04.03.04.25	Pemberitahuin perkuat kerjasama antar daerah pada bidang sukamati	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Bulan	12	456.534.312	12	77.000.000	6.702.700	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bag. Adm. Perencanaan & SDA
I. 4.04.4.04.03.01																		
Program Pelayanan																		
Administrasi Perkantoran																		
1	4.04.4.04.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ar dan listrik	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	bulan	12	6.944.049.000	12	1.089.000.000	1.069.175.000	3	162.935.189	247.043.314	50,00	38,35	409.978.503	50,00	5,90	Bag. Umum
2	4.04.4.04.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perinean kendaraan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	bulan	4,25	426.673.233	12	66.913.000	66.913.000	3	11.911.900	53.780.845	50,00	98,18	65.692.745	1,41	15,40	Bag. Umum
3	4.04.4.04.03.01.05	Penyediaan layanan kesehatan dan kesehatan kantor	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	bulan	72	1.666.155.687	12	299.726.500	329.725.000	3	119.893.000	142.343.000	50,00	43,17	142.343.000	8,33	8,59	Bag. Umum
4	4.04.4.04.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	bulan	72	1.157.341.500	12	181.500.000	100.000.000	3	24.947.000	24.947.000	25,00	24,95	24.947.000	4,17	2,16	Bag. Umum
5	4.04.4.04.03.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	buah	1.847	335.937.659	12	52.683.400	40.000.000	3	3.040.000	9.120.000	50,00	30,40	12.160.000	0,32	3,62	Bag. Umum
6	4.04.4.04.03.01.10	Repat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Serta Kedinasannya Lainnya	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	kali	-	-	-	19.681.000	240.000.000	-	-	99.582.500	0,00	49,69	119.263.500	0,00	0,00	Bag. Umum



Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Tahun Akhir Periode Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018		Unit SKPD Pananggung Jawab	Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
I.																					
7	4.04.4.04.03.02.20	Pengelolaan pelayanan administrasi pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan	bulan	-	-	-	-	12	1.974.943.245	1.523.214.500	3	470.078.900	6	728.752.400	0,00	0,00	Bag. Umum			
8	4.04.4.04.03.02.21	Pengelolaan keadilan rumah tangga KHWI/WDH	Tersedianya mekanis rumah tangga bucat dan laundry	bulan	72	7.869.922.200	1.020.000.000	12	1.294.200.000	1.020.000.000	3	169.880.000	3	254.520.000	50,00	41,61	6	424.400.000	5,39	Bag. Umum	
9	4.04.4.04.03.02.24	Promosi jasa pemeliharaan kesehatan KHWI/WDH	Ketersediaan layanan kesehatan bagi dan wali bulat	bulan	12	771.561.000	75.000.000	12	121.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bag. Umum	
II.	4.04.4.04.03.02	Program Peninjauan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
1	4.04.4.04.03.02.05	Pengkendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	unit	222	578.264.675	600.000.000	2	326.700.000	600.000.000	1	480.600.000	1	480.600.000	50,00	80,10	1	480.600.000	0,45	83,11	Bag. Umum
2	4.04.4.04.03.02.06	Pengadaan Pelelangan Rumah Jabatan	Sarana dan Prasarana Kantor	unit	2	1.711.484.324	43.900.000	12	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bag. Umum	
3	4.04.4.04.03.02.07	Pengadaan Pelelangan Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	unit	3	3.405.640.000	542.459.500	12	-	-	-	-	-	-	25,00	16,65	3	90.325.000	100,00	2,65	Bag. Umum
4	4.04.4.04.03.02.08	Pemeliharaan rumah jabatan	Perbaikan sarana dan prasarana rumah jabatan	unit	3	3.405.640.000	35.000.000	2	268.403.410	35.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	50,00	91,43	1	32.000.000	33,33	0,94	Bag. Umum
5	4.04.4.04.03.02.20	Pemeliharaan rumah dinas	Perbaikan sarana dan prasarana rumah dinas	unit	2	1.103.332.250	100.000.000	5	173.030.000	100.000.000	2	22.137.000	2	22.137.000	40,00	22,14	2	22.137.000	100,00	2,01	Bag. Umum
6	4.04.4.04.03.02.21	Pemeliharaan rumah dinas	Perbaikan sarana dan prasarana rumah dinas	unit	3	771.591.000	70.000.000	5	121.000.000	70.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bag. Umum	
7	4.04.4.04.03.02.22	Pemeliharaan rumah dinas	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	4	1.341.020.000	151.299.999	5	220.000.000	151.299.999	2	13.159.500	2	13.159.500	40,00	8,70	2	13.159.500	50,00	0,98	Bag. Umum
8	4.04.4.04.03.02.23	Pemeliharaan rumah dinas	Tersedianya pemeliharaan mobil jabatan bupati dan wakil bupati	unit	2	4.010.307.889	429.000.000	2	689.916.255	429.000.000	2	33.929.300	2	104.385.200	200,00	32,24	4	138.314.500	200,00	3,45	Bag. Umum
9	4.04.4.04.03.02.24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan mobil dinas/operasional	unit	66	11.611.993.050	1.770.000.000	80	1.821.050.000	1.770.000.000	20	388.902.013	45	691.271.813	56,25	61,03	45	1.080.173.826	68,18	9,30	Bag. Umum
10	4.04.4.04.03.02.27	Pemeliharaan rumah dinas	Perbaikan sarana dan prasarana rumah jabatan bupati dan wakil bupati	unit	2	729.982.950	65.000.000	2	114.950.000	65.000.000	-	-	2	12.145.000	100,00	18,68	2	12.145.000	100,00	1,66	Bag. Umum
11	4.04.4.04.03.02.28	Pemeliharaan rumah dinas	Perbaikan sarana dan prasarana rumah jabatan bupati dan wakil bupati	unit	12	825.570.270	60.000.000	12	129.470.000	60.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	25,00	15,00	3	9.000.000	25,00	1,09	Bag. Umum
12	4.04.4.04.03.02.40	Pemeliharaan rumah dinas	Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan	bulan	12	466.200.000	700.000.000	12	242.000.000	700.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bag. Umum	
III.	4.04.4.04.03.03	Program Peninjauan Disiplin Aparatur																			
1	4.04.4.04.03.03.02	Pengadaan pakain dinas beserta seragamnya	Tersedianya pakain bupati dan wakil bupati	set	-	-	125.000.000	2	111.925.000	125.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	100,00	12,00	2	15.000.000	0,00	0,00	Bag. Umum
IV.	4.04.4.04.03.03	Program Peninjauan Disiplin Aparatur																			
1	4.04.4.04.03.03.01	Diálogo audiens dengan tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial dan pejabat negara/departemen lembaga pemerintahan non departemen/kearsud	Aspirasi Masyarakat	kali	152	6.924.759.975	1.095.096.000	25	1.085.975.000	1.095.096.000	3	160.750.000	5	318.250.000	32,00	43,74	8	479.000.000	5,26	6,92	Bag. Umum
2	4.04.4.04.03.03.02	Pemetaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintahan non departemen/kearsud	Kunjungan Kerja Tamu Pejabat	kali	134	7.788.136.734	1.723.905.000	22	1.221.374.000	1.723.905.000	3	174.655.000	10	573.535.000	59,09	43,40	13	748.190.000	9,70	9,61	Bag. Umum





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Tahun Akhir Periode Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (AKHIR TAHUN Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
3	4.04.4.04.03.01.03	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	kali	655	4.711.151.466	-	-	102	78.826.000	515.000.000	20	82.423.300	35	204.688.900	55	287.112.200	53,92	49,93	55	287.112.200	8,40	6,09	Bag. Umum		
4	4.04.4.04.03.01.04	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah tingkat kepala daerah	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah tingkat kepala daerah	kali	1.112	1.180.488.330	-	-	12	185.130.000	124.800.000	3	10.400.000	4	41.600.000	7	52.000.000	58,33	41,67	7	52.000.000	0,63	4,40	Bag. Umum		
I. 4.04.4.04.03.01																										
1	4.04.4.04.03.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan	Bln	32	3.132.080.896	-	-	12	491.188.868	461.879.500	3	95.765.600	3	101.381.500	6	197.147.100	50,00	42,68	6	197.147.100	18,75	6,29	Bag. Keuangan		
2	4.04.4.04.03.01.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta koordinasi lainnya	Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bln	-	-	-	-	12	90.632.300	88.393.000	3	12.061.404	3	25.912.200	6	37.973.604	50,00	42,96	6	37.973.604	0,00	0,00	Bag. Keuangan		
II. 4.04.4.04.03.04																										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																										
1	4.04.4.04.03.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Indeks Realisasi	Penghasilan RKA, DPA, DPA Iqbal waktu	duk	15	753.179.264	-	-	3	64.920.251	44.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Bag. Keuangan		
2	4.04.4.04.03.04.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	duk	10	192.890.250	-	-	2	30.250.000	16.362.500	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Bag. Keuangan		
3	4.04.4.04.03.04.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	duk	10	285.840.150	-	-	2	44.826.862	25.575.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Bag. Keuangan		
4	4.04.4.04.03.04.08	Pengelolaan Manajemen /Aset	Menjalannya Manajemen Baik dan Lengkap	Bulan	13	799.417.702	-	-	12	119.095.028	97.790.000	3	7.988.000	3	57.685.250	6	65.671.250	50,00	67,16	6	65.671.250	46,15	8,65	Bag. Keuangan		
I. 4.04.4.04.03.01																										
Program Pelayanan Pelaporan																										
1	4.04.4.04.03.01.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta koordinasi lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta koordinasi lainnya	aparat skpd	-	-	-	-	92.833.400	89.234.999	-	-	4.293.800	-	-	-	-	0,00	38,10	-	-	33.998.600	0,00	0,00	Bag. Hukum & Per-UU-an	
2	4.04.4.04.03.01.11	Penyediaan Pelayanan administrasi	penyediaan administrasi	aparat skpd	-	-	-	-	86.191.801	90.391.976	-	-	7.003.300	-	-	-	-	0,00	34,47	-	-	31.160.500	0,00	0,00	Bag. Hukum & Per-UU-an	
II. 4.04.4.04.03.03																										
Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keluarga miskin																										
1	4.04.4.04.03.03.01	Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Warga Miskin yang mendapat bantuan hukum	orang	100	706.502.976	-	-	100	110.797.280	26.616.175	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Bag. Hukum & Per-UU-an		
III. 4.04.4.04.03.08																										
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KHI																										
1	4.04.4.04.03.08.01	Insurasi Lupa Hasil Temuan	Tersedianya proses insurasi lupa hasil temuan	LHP	537	541.646.394	-	-	85	84.946.638	52.330.125	-	-	15	13.457.500	15	13.457.500	17,65	25,72	15	13.457.500	2,79	2,48	Bag. Hukum & Per-UU-an		
2	4.04.4.04.03.08.02	Pembinaan Hukum bagi Pemerintah Daerah	Konsultasi hukum pemerintah daerah	Konsultasi hukum	12	1.580.681.889	-	-	2	247.890.280	130.650.250	-	-	-	-	-	-	0,00	21,51	-	-	28.100.000	0,00	1,78	Bag. Hukum & Per-UU-an	
3	4.04.4.04.03.08.03	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Tersedianya sosialisasi pengawasan TPAD	Pemda	72	270.832.702	-	-	12	42.873.320	20.637.400	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Bag. Hukum & Per-UU-an		





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Output)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (Output yang dievaluasi (2018))		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (Output yang dievaluasi (2018))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
IV. 4.04.4.04.03.11																						
Program Penilaian peraturan perundang-undangan																						
1	4.04.4.04.03.11.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Penelitian pembentukan 100 org undang-undang	orang	750	565.991.996	100	101.910.024	15.486.900	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Bag. Hukum & Per-UU-an					
2	4.04.4.04.03.11.02	Pengembangan Data LHKPN Kabupaten	Tersedianya data LHKPN di Kab. Soppeng	Paket leskom	500	282.945.945	37	50.980.716	25.600.000	-	10	825.000	27,03	3,22	2,00	0,29	Bag. Hukum & Per-UU-an					
3	4.04.4.04.03.11.03	Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terjadinya Rancangan PERDA	Rancangan PERDA	96	1.684.226.012	16	259.423.879	150.285.000	2	22.730.000	37,50	22,20	6,25	2,02	6,25	Bag. Hukum & Per-UU-an					
4	4.04.4.04.03.11.04	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Kelompok Kata/konsep	Kelompok Kata/konsep	180	1.386.893.242	30	217.499.036	83.640.825	-	28	82.440.825	93,33	98,57	15,56	5,94	5,94	Bag. Hukum & Per-UU-an				
5	4.04.4.04.03.11.05	Kajian Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku	Tersedianya pemerintihan daerah sosial dengan peraturan per-UU- Daerah yang berlaku	Produk Hukum Daerah	500	688.829.571	16	120.666.948	57.155.000	-	5	19.325.000	31,25	33,81	1,00	3,17	3,17	Bag. Hukum & Per-UU-an				
6	4.04.4.04.03.11.06	Publikasi Peraturan Perundang-undangan berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tatakelola pemerintahan tingkat kecamatan	aparat pemerintihan daerah sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tatakelola pemerintahan tingkat kecamatan	aparat pemerintihan daerah atau masyarakat	2.400	771.561.000	400	121.010.000	57.971.350	100	23.868.000	110	33.975.000	52,50	99,78	8,75	7,50	7,50	Bag. Hukum & Per-UU-an			
I. 4.04.4.04.03.01																						
Program Pelayanan Publik																						
1	4.04.4.04.03.01.10	Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta keefektifannya	terkennanya koordinasi konsultasi dalam & luar daerah	kali	98	150.000.000	1	5.803.800	150.000.200	6	59.929.800	6,12	43,76	0,00	0,00	0,00	Bag. Adm. Kesra					
2	4.04.4.04.03.01.11	Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12	100.000.000	3	16.595.600	85.998.300	3	18.552.400	50,00	40,87	0,00	0,00	0,00	Bag. Adm. Kesra					
II. 4.04.4.04.03.04																						
Program Fasilitas & Koordinasi																						
3	4.04.4.04.03.04.20	Pemilihan Pelaksanaan Sekolah Sehat	untuk meningkatkan pelaksanaan UKS pada Sekolah Dasar	kali	18	257.434.800	3	42.905.800	87.884.750	1	5.610.000	2	13.801.500	100,00	22,09	16,67	7,54	7,54	Bag. Adm. Kesra			
III. 4.04.4.04.03.05																						
Program Koordinasi & Fasilitas Kesra, Keagamaan & Peningkatan Masyarakat																						
1	4.04.4.04.03.05.01	Pelaksanaan Pembaharuan Pemungutan Jamah Haji	terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang lebih lancar	kali	1.500	2.133.139.250	2	426.227.850	465.100.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Bag. Adm. Kesra					
2	4.04.4.04.03.05.02	Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan	terwujudnya kegiatan PHBK yang lebih lancar	kali	36	1.197.209.250	7	199.534.875	248.631.250	-	3	61.770.000	42,86	24,84	3	61.770.000	8,33	5,16	5,16	Bag. Adm. Kesra		
3	4.04.4.04.03.05.03	Pelaksanaan Kekerifatan Masyarakat	terwujudnya fasilitas kerajinan lokal	kali	6	585.995.000	2	117.199.000	352.845.000	-	1	170.610.000	100,00	98,50	2	347.555.000	33,33	59,31	59,31	Bag. Adm. Kesra		
4	4.04.4.04.03.05.04	Pelaksanaan Festival Anak Shahab	untuk meningkatkan kemampuan anak	kali	6	686.958.000	1	137.391.600	72.790.000	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bag. Adm. Kesra				
5	4.04.4.04.03.05.05	Pengembangan Nilai Budaya Lasqui T.K.Kab. & Tk. Propinsi	tersejahteranya lomba Lasqui T.K.Kab. & Tk. Propinsi	kali	12	471.202.500	1	78.533.750	70.000.000	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bag. Adm. Kesra				
6	4.04.4.04.03.05.06	Pengelolaan Nilai-nilai Keagamaan	terkennanya syiar keagamaan dengan lancar	kali	72	561.945.800	13	93.624.300	205.125.000	3	13.000.000	4	17.800.000	53,85	15,02	7	30.800.000	9,72	5,48	5,48	Bag. Adm. Kesra	
7	4.04.4.04.03.05.07	Peningkatan Narkotika melalui Sistem Pengawasan Pengendalian & Pemberantasan Grup Narkotika	pengurangan narkotika & HIV/AIDS	kali	96	1.113.568.200	50	185.594.700	225.200.500	-	8	69.400.000	16,00	30,82	8	69.400.000	8,33	6,23	6,23	Bag. Adm. Kesra		





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No.	Kode	Usran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Rensira SKPD Tahun 2018 (Rencana Kerja SKPD Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja Rensira SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (Rencana Kerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD s.d. Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s.d. Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
I.	4.04.4.04.03.01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN															
1	4.04.4.04.03.01.10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi di dan luar daerah serta konsultasi lainnya	Tertaskannya koordinasi dan konsultasi di dan luar daerah	Kali	-	110	149.637.700	-	10	43.537.630	10	43.537.630	0,00	0,00	Bag. Pemerintahan dan Otda		
2	4.04.4.04.03.01.11	Pembinaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Paket	-	5	116.650.350	-	1	26.853.900	2	53.710.600	0,00	0,00	Bag. Pemerintahan dan Otda		
II.	4.04.4.04.03.02	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH															
1	4.04.4.04.03.02.01	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	Tersedianya Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	Dok	5	1	24.200.000	0,25	26.853.900	1	26.853.900	1	31.150.000	10,00	11,34	Bag. Pemerintahan dan Otda	
2	4.04.4.04.03.02.02	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wakil Bupati	Tersedianya Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wakil Bupati	Dok	5	1	63.450.000	0,25	19.600.000	1	35.250.000	1	54.850.000	10,00	17,97	Bag. Pemerintahan dan Otda	
III.	4.04.4.04.03.04	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMUDA															
1	4.04.4.04.03.04.06	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Tertaskannya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Dok	8	1	30.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Bag. Pemerintahan dan Otda		
2	4.04.4.04.03.04.07	Pendaftaran Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan	Tertaskannya PATEN di Kecamatan	Kec	8	8	22.000.000	-	2.100.000	-	2.100.000	-	0,00	0,57	Bag. Pemerintahan dan Otda		
3	4.04.4.04.03.04.08	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Soppeng	Jesunya Data mengenai Tugas Pembantuan di Kabupaten Soppeng	Dok	6	1	36.600.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Bag. Pemerintahan dan Otda		
4	4.04.4.04.03.04.11	Pelaksanaan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan	Jesunya Data mengenai Wilayah Perbatasan Kabupaten, kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dok	6	1	17.600.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Bag. Pemerintahan dan Otda		
5	4.04.4.04.03.04.12	Koordinasi Pembinaan Urus Rupa Bumi Kabupaten Soppeng	Tertaskannya Koordinasi Rupa Bumi Kabupaten Soppeng	Kec	8	8	17.950.000	-	875.000	2	875.000	2	875.000	25,00	0,17	Bag. Pemerintahan dan Otda	
6	4.04.4.04.03.04.19	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Tertaskannya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Dok	2	1	26.620.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Bag. Pemerintahan dan Otda		





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No.	Kode	Usaha/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD		Target Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun Belanja yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra SKPD Th. 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2018		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	74.04.4.04.03.04.24	Peleaksanaan Koordinasi Masalah Keamanan dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Rasa Keamanan dan berkurangnya Tindak Kriminal	Kec.	48	2.086.538.347	82.700.000	27.150.000	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Bag. Pemerintahan dan Ombuds	
8	4.04.4.04.03.04.32	Administrasi Kepala Desa/Walikota/Kepala Daerah dan DPRD	Kemudahan Pelaksanaan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Duk	5	183.153.000	23.450.000	18.450.000	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Bag. Pemerintahan dan Ombuds	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		Predikat Kinerja							
					30,04		29,41		6,95		77,625.955,14		12,08		3,77			
					2.639.042.884		19.665.885.674		5.123.517.480		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dengan tugas pokok tersebut, kinerja dari pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dapat dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Disamping menggunakan SPM proses analisis dan pengukuran kinerja terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan yang menjadi tupoksinya dapat pula menggunakan *analisis kebutuhan pelayanan* sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, terdiri dari :

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah daerah;
2. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Mengoordinasikan perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan, administrasi perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta administrasi umum;



4. Mengoordinasikan perumusan kebijakan bidang perekonomian, pembangunan, sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat;
5. Melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur dan penegakan disiplin aparatur;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian serta pengelolaan urusan sumber daya alam;
8. Mengoordinasikan dan mengendalikan perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan fasilitasi koordinasi bidang keagamaan;
9. Membina pelaksanaan tugas administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif;
10. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dalam bidang pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah terkait dengan mengoordinasikan layanan administrasi Sekretariat Daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk hukum dan perundang-undangan;
11. Mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring pelaksanaan tugas perangkat daerah;
12. Mengoordinasikan dan memfasilitasi permasalahan-permasalahan perangkat daerah dan memberikan solusi pemecahan masalahnya;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, agar sesuai dengan rencana dan target yang direncanakan;
14. Mengarahkan dan memberi dukungan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dapat digambarkan berdasarkan telaahan sesuai dengan pengamatan dan kondisi yang mencakup faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan-pelayanan yang ada selama ini, Adapun isu-isu penting yang sangat mendesak untuk ditangani oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:



1. Rendahnya Kualitas SDM Aparatur;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung tugas;
3. Rendahnya Penegakan Disiplin Aparatur;
4. Kapasitas SDM Aparatur kurang memadai;
5. Penataan pedoman yang berkaitan dengan standar, prosedur mekanisme kerja maupun yang berkaitan dengan standar, prosedur mekanisme pelayanan belum berjalan dengan baik;
6. Masih rendahnya kesadaran dan disiplin pejabat dalam memahami jabatan dan tanggungjawab yang diembannya.

Beberapa isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang dapat berpengaruh dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Peluang :

1. Masih terbentang luas kesempatan aparat untuk membenahi diri dengan mengikuti Diklat-diklat, Bimtek-bimtek dalam upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur, dengan lebih banyak memberikan kesempatan kepada staf sehingga pada gilirannya akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi atasan.
2. Adanya peningkatan dana untuk pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun peningkatan keterampilan, melalui bimtek, diklat-diklat dan sebagainya.
3. Tingginya komitmen pimpinan untuk berupaya membenahi sarana dan prasarana pendukung tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Tingginya perhatian pimpinan untuk berupaya merumuskan sistem dalam rangka pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Masih adanya sebagian besar pegawai menyadari akan tugas dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang diemban, sehingga masih terlihat motivasi kerja yang tinggi.

b. Faktor Ancaman

1. Belum sepenuhnya tercipta alur-alur mekanisme koordinasi baik antar bagian maupun lintas SKPD.
2. Masih lemahnya pengawasan, dan belum sepenuhnya dilakukan penerapan sanksi terhadap aparat yang kurang disiplin.



3. Tingkat kesejahteraan aparat belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga cenderung pegawai masih ada yang cenderung mencari pekerjaan-pekerjaan sampingan demi untuk menambah penghasilan mereka.
4. Staf belum sepenuhnya memahami dengan jelas penjabaran tupoksinya.
5. Pelaksanaan Tugas dan fungsi belum dilengkapi dengan pedoman dan standar operasional prosedur.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terhadap Kebijakan Nasional, Prioritas pembangunan nasional merupakan penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang pada tahun terakhir pelaksanaannya ini difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya baik dari pemerintah, swasta maupun perbankan untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dilaksanakan dengan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” melalui 5 prioritas nasional dan 24 program prioritas. Adapun Prioritas Nasional Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air.
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Pada 5 prioritas nasional tersebut, dijabarkan menjadi beberapa program nasional, antara lain:

Prioritas Nasional - 1

1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
4. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
5. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

Prioritas Nasional - 2

6. Peningkatan Konektivitas dan TIK
7. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
8. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa
9. Penanggulangan Bencana
10. Peningkatan Sistem Logistik

Prioritas Nasional - 3

11. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian
12. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan
13. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif
14. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
15. Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

Prioritas Nasional - 4

16. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
17. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
18. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
19. Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan

Prioritas Nasional - 5

20. Kamtibmas dan Keamanan Siber
21. Kesuksesan Pemilu
22. Pertahanan Wilayah Nasional
23. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi
24. Efektivitas Diplomasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Menyesuaikan dengan Dokumen Renstra 2016-2021, maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan bidang Administrasi Umum terhadap pelayanan pimpinan dan perangkat daerah yang berorientasi pelayanan publik
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
3. Mewujudkan peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan pengendalian pembangunan yang efektif
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan efektifitas pengkoordinasian perangkat daerah
5. Meningkatkan Kinerja Aparatur

Adapun Sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terlayannya kedinasan KDH & WKDH dengan baik
2. Meningkatnya Jumlah SKPD yang kelembagaannya telah sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatnya pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD
4. Terwujudnya Penyelesaian regulasi dan kasus hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba
6. Terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah melalui teknologi informasi yang berkualitas
7. Terwujudnya Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui pelelangan/seleksi yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu
8. Terfasilitasinya fungsi koordinasi pada SKPD yang terkait tugas pokok dan fungsi.
9. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan
10. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor

3.3. Program dan Kegiatan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja Perubahan Sekretariat Daerah akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, adapun rencana program dan kegiatan terdiri atas 16 Program dan 110 Kegiatan yang terbagi pada 9 Bagian pada Sekretariat daerah Kabupaten Soppeng



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2018 yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang masing-masing memiliki indikator dalam pengukuran kinerjanya yang akan dicapai di tahun tersebut. Pelaksanaan kegiatan secara spesifik diperjelas dengan penjelasan lokasi pekerjaan, target capaian kinerja dan unit kerja penanggung jawab dilengkapi dengan kebutuhan dana yang direncanakan serta sumber dananya.

Rencana program dan kegiatan dimaksud sebagaimana tabel pada berikut:





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018			Unit Kerja Penanggung Jawab	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif				Usulan Pagu Perubahan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.04	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN									
4.04	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya	Mengikuti rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	dalam & Luar Kab. Soppeng	350 kali	Rp 142.562.700,-	Rp 208.402.700,-	Bag. Pemerintahan & Otda		350 kali	Rp 142.562.700,-
4.04	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Walansoppeng	12 bh	Rp 121.392.300,-	Rp 129.442.300,-	Bag. Pemerintahan & Otda		12 bh	Rp 121.392.300,-
4.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH									
4.04	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	Tersedianya laporan (LK/PJ)	Walansoppeng	1 dok	Rp 31.600.000,-	Rp 31.600.000,-	Bag. Pemerintahan & Otda		1 dok	Rp 31.600.000,-
4.04	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten	Tersedianya laporan (LPPD)	Walansoppeng	1 dok	Rp 114.950.000,-	Rp 89.900.000,-	Bag. Pemerintahan & Otda		1 dok	Rp 114.950.000,-
4.04	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA									
4.04	Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Tersedianya laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Kab. Soppeng	1 dok	Rp 17.500.000,-	Rp 17.500.000,-	Bag. Pemerintahan & Otda		1 dok	Rp 17.500.000,-
4.04	Fasilitasi Pelaksanaan PATEN di Kecamatan	Terdiksananya PATEN di Kecamatan	Kab. Soppeng	1 dok	Rp 6.300.000,-	Rp 4.200.000,-	Bag. Pemerintahan & Otda		1 dok	Rp 6.300.000,-
4.04	Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan di kabupaten soppeng	Tersedianya data mengenai wilayah perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kab. Soppeng	1 dok	Rp 36.600.000,-	Rp 20.850.000,-	Bag. Pemerintahan & Otda		1 dok	Rp 36.600.000,-
4.04	Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tersedianya data mengenai wilayah perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kab. Soppeng	1 dok	Rp 28.500.000,-	Rp 28.500.000,-	Bag. Pemerintahan & Otda		1 dok	Rp 28.500.000,-
4.04	Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng	Tersedianya data Pembakuan Nama Rupabumi Kab. Soppeng	Kab. Soppeng	1 dok	Rp 5.575.000,-	Rp 15.375.000,-	Bag. Pemerintahan & Otda		1 dok	Rp 5.575.000,-
4.04	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Kab. Soppeng	1 dok	Rp 35.720.000,-	Rp -	Bag. Pemerintahan & Otda		1 dok	Rp 35.720.000,-
4.04	Fasilitasi dan Koordinasi masalah keamanan dan pencegahan tindak kriminal	teraksananya Rapat-rapat dan Koordinasi Masalah Keamanan dan Pencegahan Tindak kriminal	Kab. Soppeng	1 dok	Rp 27.150.000,-	Rp 27.150.000,-	Bag. Pemerintahan & Otda		1 dok	Rp 27.150.000,-
4.04	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah/Wakil Daerah dan DPRD (PAW)	Tersedianya data Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD	Kab. Soppeng	1 dok	Rp 18.450.000,-	Rp 2.950.000,-	Bag. Pemerintahan & Otda		1 dok	Rp 18.450.000,-
1.06	PROGRAM PEMBIAN PERTIMBANGAN, PENDAPAT DAN PENDAMPINGAN HUKUM KELUARGA MISKIN									
1.06	Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Warga miskin yg mendapat bantuan hukum		100	Rp 26.616.175,-	Rp 26.616.175,-	Bag. Hukum & UU		100	Rp 121.877.008,-
4.04	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN									
4.04	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Mengikuti rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi		135	Rp 89.234.999,-	Rp 126.796.475,-	Bag. Hukum & UU		135	Rp 102.116.740,-
4.04	Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran		1	Rp 90.391.976,-	Rp 81.680.500,-	Bag. Hukum & UU		1	Rp 94.810.981,-





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018			Usulan Pagu Perubahan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif					Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.04	4.04.03	08	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH							
4.04	4.04.03	08 01	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL : Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan							
4.04	4.04.03	08 02	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL : Pendampingan Hukum bagi Pemerintahan Daerah		88	Rp 52.330.125,-	Bag. Hukum & UU		91	Rp 52.330.125,-
4.04	4.04.03	08 03	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL : Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif		2	Rp 130.650.250,-	Bag. Hukum & UU		2	Rp 272.679.308,-
4.04	4.04.03	08 03	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL : Terlewatnya sosialisasi pengawasan TP4D		12	Rp 20.637.400,-	Bag. Hukum & UU		12	Rp 46.720.652,-
4.04	4.04.03	11	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							
4.04	4.04.03	11 01	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : Kegiatan Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		150	Rp 15.486.900,-	Bag. Hukum & UU		150	Rp 112.156.917,-
4.04	4.04.03	11 02	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : Kegiatan pengelabuan Data LHKPN		100	Rp 25.600.000,-	Bag. Hukum & UU		100	Rp 56.078.458,-
4.04	4.04.03	11 03	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan		16	Rp 150.285.000,-	Bag. Hukum & UU		16	Rp 285.366.267,-
4.04	4.04.03	11 04	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan		30	Rp 82.440.825,-	Bag. Hukum & UU		30	Rp 239.249.380,-
4.04	4.04.03	11 05	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-undangan Daerah		100	Rp 57.155.000,-	Bag. Hukum & UU		100	Rp 132.733.642,-
4.04	4.04.03	11 06	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak tembakau		400	Rp 57.971.350,-	Bag. Hukum & UU		400	Rp 133.100.000,-
4.04	4.04.03	01	Program Pelayanan Perkantoran							
4.04	4.04.03	01 10	Program Pelayanan Perkantoran : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya		350 kali	Rp 112.987.550,-	Bag. Orjala		375kali	Rp 465.850.000,-
4.04	4.04.03	01 11	Program Pelayanan Perkantoran : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bin	Rp 53.034.275,-	Bag. Orjala		12 Bin	Rp 2.172.437.570,-
4.04	4.04.03	01 12	Program Pelayanan Perkantoran : Penyediaan Jasa Perkantoran		21 org	Rp 127.375.000,-	Bag. Orjala		21 Org	Rp 141.900.000,-
4.04	4.04.03	03	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur							
4.04	4.04.03	03 09	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		18 kali	Rp 115.796.125,-	Bag. Orjala		20 kali	Rp 153.956.736,-
4.04	4.04.03	03 17	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur : Peningkatan Disiplin Aparatur		152 org	Rp 24.531.900,-	Bag. Orjala		156 org	Rp 57.750.000,-
4.04	4.04.03	03 18	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur : Administrasi Kepegawaian		152 org	Rp 42.547.900,-	Bag. Orjala		156 org	Rp 105.388.668,-
4.04	4.04.03	03 02	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur : Evaluasi Jabatan		152 org	Rp 30.992.500,-	Bag. Orjala		156 org	Rp 105.388.668,-
4.04	4.04.03	03 03	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur : Penyusunan Kompetensi / Analisis Jabatan		152 org	Rp 32.107.250,-	Bag. Orjala		156 org	Rp 105.388.668,-
4.04	4.04.03	03 04	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur : Evaluasi kelembagaan serta Tugas dan Fungsi		152 org	Rp 30.979.900,-	Bag. Orjala		156 org	Rp 105.388.668,-
4.04	4.04.03	03 05	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur : Proses Pelaksanaan Kelalaaksanaan		152 org	Rp 19.436.125,-	Bag. Orjala		156 org	Rp 105.388.668,-
4.04	4.04.03	03 06	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur : Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja		152 org	Rp 36.579.400,-	Bag. Orjala		156 org	Rp 105.388.668,-
4.04	4.04.27	03 07	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur : Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi		152 org	Rp 8.374.775,-	Bag. Orjala		156 org	Rp 105.388.668,-
4.04	4.04.27	04 01	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur : Pendampingan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD		152 org	Rp 38.299.900,-	Bag. Orjala		156 org	Rp 105.388.668,-





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Unit Kerja Penanggung Jawab	Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2019 target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Usulan Pagu Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4.04	4.04.27	12	01	Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik	Kec. Labatala	Rp	28.199.750,-	Rp	28.199.750,-	156 org	156 org	Rp	105.388.668,-
4.04	4.04.27	12	03	Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	Kec. Labatala	Rp	29.299.925,-	Rp	29.299.925,-	152 org	152 org	Rp	105.388.668,-
4.04	4.04.27	12	05	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik	Kec. Labatala	Rp	31.674.850,-	Rp	31.674.850,-	152 org	152 org	Rp	105.388.668,-
4.04	4.04.03	01		Program Pelayanan Perkantoran									
4.04	4.04.03	01	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kab.Soppeng dan luar kab.soppeng	Rp	128.609.650,-	Rp	107.289.650,-	1	1	Rp	219.820.458,-
4.04	4.04.03	01	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Walaansoppeng	Rp	83.681.800,-	Rp	83.681.800,-	1	1	Rp	102.328.853,-
4.04	4.04.03	04		Program Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Pemda									
4.04	4.04.03	04	02	Sosialisasi Ketemuannya di Bidang Cukai									
4.04	4.04.03	04	03	Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembaku Ilegal	Kab.Soppeng	Rp	39.074.950,-	Rp	39.074.950,-	1 kali	1 kali	Rp	73.205.000,-
4.04	4.04.03	04	13	Fasilitasi Agen/Pangkalan BGM dan LPG Bersubsidi	Walaansoppeng	Rp	160.924.250,-	Rp	160.924.250,-	4 dok	4 dok	Rp	244.394.400,-
4.04	4.04.03	04	14	Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian	Kab.Soppeng	Rp	6.900.000,-	Rp	6.900.000,-	1 dok	1 dok	Rp	44.770.000,-
4.04	4.04.03	04	15	Koordinasi Teknis Penerbitan Ternak Berkelahiran	Kab.Soppeng	Rp	10.025.000,-	Rp	10.025.000,-	1 dok	1 dok	Rp	60.500.000,-
4.04	4.04.03	04	17	Koordinasi dan Evaluasi Penggabaan RPH dan Labu Lintas Ternak	Kab.Soppeng	Rp	9.503.925,-	Rp	9.503.925,-	4 Kali	4 kali	Rp	42.350.000,-
4.04	4.04.03	04	25	Fasilitasi/Pembinaan kekuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Kab.Soppeng	Rp	11.512.500,-	Rp	11.512.500,-	1 dok	1 dok	Rp	30.250.000,-
4.04	4.04.03	01		PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN									
4.04	4.04.03	01	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya	dalam & Luar Kab.Soppeng	Rp	125.782.100,-	Rp	119.250.332,-	350 kali	350 kali	Rp	138.361.000,-
4.04	4.04.03	01	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Walaansoppeng	Rp	123.069.668,-	Rp	123.069.668,-	12 bh	12 bh	Rp	135.377.000,-
4.04	4.04.03	04		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
4.04	4.04.03	04	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Walaansoppeng	Rp	7.050.000,-	Rp	7.420.000,-	1 dok	1 dok	Rp	42.657.219,-
4.04	4.04.03	04	04	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA									
4.04	4.04.03	04	05	Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan Darat dan Data Pameran Pemerintah Daerah	Walaansoppeng	Rp	1.060.000,-	Rp	495.000,-	1 dok	1 dok	Rp	45.254.000,-





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018			Unit Kerja Penanggung Jawab	Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			Usulan Pagu Perubahan	target capaian target kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.04	4.04.03	06	PROGRAM PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH								
4.04	4.04.03	06	01	Pengendalian dan Pengkajian Data Pembangunan sektor Kabupaten Soppeng	tersedianya laporan dan capaian realisasi fisik proyek/kegiatan pembangunan	Kab. Soppeng	1 dok	Rp 12.250.000,-	Rp 11.375.000,-	1 dok	Rp 42.156.630,-
4.04	4.04.03	06	02	Pembinaan Jasa Konstruksi/Kabupaten	Tercapainya pembinaan jasa konstruksi tingkat kabupaten	Kab. Soppeng	1 dok	Rp 33.928.232,-	Rp 35.775.000,-	1 dok	Rp 135.585.110,-
4.04	4.04.03	07	PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA								
4.04	4.04.03	07	01	Penyelenggaraan Unit Layanan Barang/ Jasa (ULP)	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	Walaansoppeng	110 pkt	Rp 293.270.000,-	Rp 323.270.000,-	115 pkt	Rp 330.972.183,-
4.04	4.04.03	07	03	Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa	Tersedianya data evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang ditender	Kab. Soppeng	1 dok	Rp 1.060.000,-	Rp 495.000,-	1 dok	Rp 106.253.863,-
4.04	4.04.03	01	Program Pelayanan Perkantoran								
4.04	4.04.03	01	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah serta kedinasan lainnya	Mengikuti Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah	Luar Kabupaten Soppeng	100 kali	Rp 150.000.200,-	Rp 191.600.200,-	100	Rp 150.000.000,-
4.04	4.04.03	01	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Walaansoppeng	12 bh	Rp 85.998.300,-	Rp 85.998.300,-	12 bh	Rp 100.000.000,-
4.04	4.04.03	04	26	Prog Fasilitas & Koord Kabjajakan Pemda	Tertindakannya Lomba Sekolah Sehat	Walaansoppeng	3 kali	Rp 87.884.750,-	Rp 81.084.750,-	3 kali	Rp 42.905.800,-
4.04	4.04.03	05	Prog Koord & Fasilitas Kesra, Keagamaan dan Penanggulangan Narkoba								
4.04	4.04.03	05	01	Keg. Fasilitas Pelaksanaan Pemberangkatan/ Pemulangan Jamaah Haji	Tersedianya Transportasi Jamaah haji dari Soppeng ke Asrama Haji	Walaansoppeng	250	Rp 465.100.000,-	Rp 456.100.000,-	250	Rp 426.227.850,-
4.04	4.04.03	05	02	Keg. Fasilitas Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Keagamaan	Terselenggaranya Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan	Walaansoppeng	6 keg	Rp 248.631.250,-	Rp 248.631.250,-	6	Rp 199.534.875,-
4.04	4.04.03	05	03	Keg. Fasilitas Pelaksanaan/Keikutsertaan MTO & STQ	Tersedianya Fasilitas Kegiatan MTO/STQ	-	1 keg	Rp 352.845.000,-	Rp 352.845.000,-	1 keg	Rp 117.199.000,-
4.04	4.04.03	05	04	Keg. Fasilitas Pelaksanaan Festival Anak Sholeh	Terdaksananya Festival Anak Sholeh	Walaansoppeng	1 keg	Rp 72.790.000,-	Rp 72.790.000,-	1 keg	Rp 137.391.600,-
4.04	4.04.03	05	05	Keg. Pengembangan Nilai Budaya LASQI	Terdaksananya Festival LASQI	8 Kec	2 Kali	Rp 70.000.000,-	Rp 65.000.000,-	2 Kali	Rp 78.533.750,-
4.04	4.04.03	05	06	Keg. Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan	Peningkatan nilai-nilai Keagamaan	Walaansoppeng	12 Kali	Rp 205.125.000,-	Rp 184.325.000,-	12 Kali	Rp 93.624.300,-
4.04	4.04.03	05	07	Keg. Fasilitas Penanganan Narkoba Melalui Sistem Pencapaian Penyalnggunaan & Pemberantasan Gelap Narkoba (P4GN)	Penyuluhan Penanganan Narkoba	8 Kec	16 kali	Rp 225.200.500,-	Rp 225.200.500,-	16 kali	Rp 185.594.700,-
4.04	4.04.03	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN								
4.04	4.04.03	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik	Walaansoppeng, Makassar, Jakarta dan Jogjakarta	12 bh	Rp 1.069.175.000,-	Rp 1.069.175.000,-	12 Kali	Rp 1.197.900.000,-
4.04	4.04.03	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya Perpapangan Perizinan Kendaraan Dinas.	Walaansoppeng, Jakarta	69 Unit	Rp 66.913.000,-	Rp 96.913.000,-	69 Unit	Rp 73.604.300,-





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018			Unit Kerja Penanggung Jawab	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif				Usulan Pagu Perubahan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4.04	4.04.03	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor	Walaansoppeng, Jakarta	12 bh	Rp 329.725.000,-	Rp 329.725.000,-	Bag. Umum	12 bh	Rp 285.699.150,-
4.04	4.04.03	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan dan peralatan listrik lainnya	Walaansoppeng,	12 bh	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-	Bag. Umum	12 bh	Rp 199.650.000,-
4.04	4.04.03	01	09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biaya pengisian tabung gas	Walaansoppeng	307 Buah	Rp 40.000.000,-	Rp 40.000.000,-	Bag. Umum	321 Buah	Rp 57.951.740,-
4.04	4.04.03	01	10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya		Walaansoppeng	307 Buah	Rp 240.000.000,-	Rp 240.000.000,-	Bag. Umum	321 Buah	Rp 57.951.740,-
4.04	4.04.03	11	10	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Walaansoppeng	12 bh	Rp 1.523.214.500,-	Rp 1.730.214.500,-	Bag. Umum	12 bh	Rp 2.172.437.570,-
4.04	4.04.03	01	14	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/ WKDH	Tersedianya makan dan minum rumah tangga Bupati/Wakil Bupati	Walaansoppeng	12 bh	Rp 1.020.000.000,-	Rp 1.020.000.000,-	Bag. Umum	12 bh	Rp 1.357.620.000,-
4.04	4.04.03	01	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Terwujudnya pelayanan kesehatan Bupati/Wakil Bupati	Walaansoppeng	2 org	Rp 75.000.000,-	Rp 75.000.000,-	Bag. Umum	2 org	Rp 133.100.000,-
4.04	4.04.03	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
4.04	4.04.03	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor Sekda	Kantor Bupati Soppeng	2 Unit	Rp 600.000.000,-	Rp 980.600.000,-	Bag. Umum	3 Unit	Rp 359.370.000,-
4.04	4.04.03	02	06	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	Tersedianya peralatan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Walaansoppeng	2 Unit	Rp 43.908.000,-	Rp 197.408.000,-	Bag. Umum	2 Unit	Rp 295.243.751,-
4.04	4.04.03	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kantor Bupati, Soppeng/ Mess Jakarta	3 Unit	Rp 542.459.500,-	Rp 589.017.000,-	Bag. Umum	3 Unit	Rp 605.000.000,-
4.04	4.04.03	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan		Kantor Bupati, Soppeng/ Mess Jakarta	3 Unit	Rp 35.000.000,-	Rp 32.000.000,-	Bag. Umum	3 Unit	Rp 605.000.000,-
4.04	4.04.03	02	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati	Walaansoppeng	2 Unit	Rp 100.000.000,-	Rp 102.224.000,-	Bag. Umum	2 Unit	Rp 190.333.000,-
4.04	4.04.03	02	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah dinas	Walaansoppeng	3 Unit	Rp 70.000.000,-	Rp 60.000.000,-	Bag. Umum	3 Unit	Rp 133.100.000,-
4.04	4.04.03	02	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung/kantor	Walaansoppeng	4 Unit	Rp 151.299.999,-	Rp 151.521.999,-	Bag. Umum	4 Unit	Rp 242.000.000,-
4.04	4.04.03	02	14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan Bupati/Wakil Bupati	Walaansoppeng	2 Unit	Rp 429.000.000,-	Rp 433.918.000,-	Bag. Umum	2 Unit	Rp 691.807.881,-
4.04	4.04.03	02	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya pemeliharaan mobil dinas/operasional	Walaansoppeng	87 Unit	Rp 1.770.000.000,-	Rp 1.989.122.500,-	Bag. Umum	96 Unit	Rp 2.003.155.000,-
4.04	4.04.03	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah/jabatan/dinas	Terpeliharanya peralatan rumah tangga pejabat Bupati/Wakil Bupati	Walaansoppeng	2 Unit	Rp 65.000.000,-	Rp 65.000.000,-	Bag. Umum	2 Unit	Rp 126.445.000,-
4.04	4.04.03	02	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Walaansoppeng	3 Unit	Rp 60.000.000,-	Rp 60.000.000,-	Bag. Umum	3 Unit	Rp 142.417.000,-
4.04	4.04.03	02		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Tercapainya perbaikan rumah dinas	Walaansoppeng	1 pkl	Rp 700.000.000,-	Rp 700.000.000,-	Bag. Umum	1 pkl	Rp 266.200.000,-





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018			Unit Kerja Penanggung Jawab	Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2019 target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
4.04	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONAL								
4.04	01 Pengadaan pakelan dinas beserta perlengkapan	Terwujudnya pakelan Bupati dan Wakil Bupati	Walisoppeng	37 pkt	Rp 125.000.000,-	Bag. Umum		37 pkt	Rp 123.117.500,-
4.04	PROGRAM PENINGKATAN KEDINESAN KHD DAN WKDH								
4.04	01 Diagg/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	Terwujudnya pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati	Walisoppeng	25 Kali	Rp 1.095.096.000,-	Bag. Umum		27 Kali	Rp 1.194.572.500,-
4.04	02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terwujudnya pelayanan pejabat negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Kabupaten Soppeng	22 Kali	Rp 1.723.909.000,-	Bag. Umum		23 Kali	Rp 1.343.511.400,-
4.04	03 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terwujudnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan	Indonesia	107 Kali	Rp 575.000.000,-	Bag. Umum		112 Kali	Rp 812.708.600,-
4.04	04 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terwujudnya kunjungan kerjainspeksi Bupati/Wakil Bupati	Walisoppeng	182 Kali	Rp 124.800.000,-	Bag. Umum		189 Kali	Rp 203.643.000,-
4.04	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN								
4.04	01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Lalabata	50 Media	Rp 249.630.000,-	Bag. Humas & Protokol		55 Media	Rp 399.300.000,-
4.04	02 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya	Mengikuti Rapat - rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dalam dan Luar Kabupaten	350 Kali	Rp 230.125.000,-	Bag. Humas & Protokol		375 Kali	Rp 465.850.000,-
4.04	03 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Walisoppeng	12 Bulan	Rp 174.436.150,-	Bag. Humas & Protokol		12 Bulan	Rp 325.000.000,-
4.04	04 Penyediaan Operasional Mess Pemda	Jumlah Petugas Operasional Mess Pemda yang Terbayarkan	Jakarta	6 Kegiatan	Rp 309.000.000,-	Bag. Humas & Protokol		7 Kegiatan	Rp 242.907.500,-
4.04	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
4.04	02 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Sruato dan Komunikasi	Jumlah Perabahan yang Dipelihara	Walisoppeng	6 Paket	Rp 15.000.000,-	Bag. Humas & Protokol		8 Paket	Rp 34.606.000,-
4.04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROTOKOLERAN								
4.04	02 Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran	Lancarnya Setiap Acara Melalui Peningkatan Keprotokoleran	Dalam dan Luar Kabupaten	55 Kali	Rp 198.350.000,-	Bag. Humas & Protokol		60	Rp 151.482.540,-
4.04	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
4.04	01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggarakannya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Lalabata	32 org	Rp 461.879.500,-	Bag. Keuangan		32 org	Rp 540.307.205,-
4.04	02 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Lalabata	12 bh	Rp 88.393.000,-	Bag. Keuangan		12 bh	Rp 99.695.530,-





Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018			Unit Kerja Penanggung Jawab	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			Usulan Pagu Perubahan	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terselesainya RKA, DPA, DPPA Tepat Waktu	Lalabata	3 dok	Rp 44.500.000,-	Rp 41.499.750,-	Bag. Keuangan		3 dok	Rp 71.412.275,-
4.04	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Lalabata	2 dok	Rp 16.362.500,-	Rp 16.362.500,-	Bag. Keuangan		2 dok	Rp 33.275.000,-
4.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Lalabata	2 dok	Rp 25.575.000,-	Rp 25.575.000,-	Bag. Keuangan		2 dok	Rp 49.309.548,-
4.04	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	Meningkatnya Manajemen Asset/Barang Daerah yang baik dan lengkap	Lalabata	13 org	Rp 97.790.000,-	DAU	Bag. Keuangan		13 org	Rp 131.005.191,-



BAB V PENUTUP

Sebagai suatu pedoman dasar dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di akhir tahun berjalan yang memuat perencanaan yang sistematis, terukur dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, Rencana Kerja (RENJA SKPD) Sekretariat Daerah juga merupakan dasar dan acuan dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja yang bersifat tahunan.

Renja Perubahan Sekretariat Daerah disusun dengan harapan agar semua unsur yang ada pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng tidak hanya sebagai tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya namun lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi dan kadang sifatnya tak terduga.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Periode 2016-2021 dan tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal dan merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan, antara lain:

1. Seluruh aparatur Sekretariat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2018 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Perubahan Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang difungsikan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Perubahan Tahun 2018 yang dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen penganggaran.
3. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2019 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Renja Perubahan Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan melalui proses persiapan hingga pelaksanaannya perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta kurang bermanfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Soppeng pada umumnya.

Semoga RENJA Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng ini dapat memberikan masukan dan sumbangsih yang berarti bagi pencapaian tujuan dan cita-cita luhur yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada periode Tahun 2018.

Watansoppeng,

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. A. TENRI SESSU, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

N i p : 19640528 199103 1 009

